

JURNAL

PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 TAHUN ANGGARAN 2022




BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN WAJO
TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN

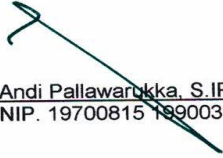
1. Judul Kegiatan : Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 TA. 2022
- Identitas Kelompok Kerja :
 - a. Nama Ketua : Andi Pallawarukka, S.IP.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 19700815 199003 1 001
 - d. Jabatan : Kepala Badan
 - e. Unit Kerja : Bappelitbangda Kabupaten Wajo
2. Output Kegiatan : Laporan
3. Anggota : 10 (sepuluh) anggota

Sengkang, Desember 2022

Mengesahkan,
Sekretaris Daerah Kab. Wajo
Selaku
Pengarang


Ir. Armayani, M.Si.
NIP. 19661125 199003 2 009

Ketua Pokja


Andi Pallawarukka, S.IP.
NIP. 19700815 199003 1 003

LATAR BELAKANG

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

IPKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD. Kemendagri melakukan pengukuran IPKD provinsi, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengukuran IPKD Kabupaten/Kota.

Pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan melalui aplikasi dengan melakukan menginputan data yang dibutuhkan. Terdapat 6 dimensi yang diukur, yaitu:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, terdiri dari :
 - a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD
 - b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA – PPAS
 - c. Kesesuaian nomenklatur program KUA - PPAS dengan APBD
 - d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA – PPAS
 - e. Kesesuaian pagu program KUA – PPAS dengan APBD
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, yaitu :
 - a. Alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%
 - b. Alokasi anggaran belanja untuk fungsi kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji
 - c. Alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer
 - d. Alokasi anggaran belanja untuk menerima SPM
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Ketetapan waktu pengungkapan
 - b. Keteraksesan
4. Penyerapan Anggaran, antara lain:
 - a. Anggaran Belanja Pegawai
 - b. Anggaran Belanja Bunga
 - c. Anggaran Belanja Subsidi
 - d. Anggaran Belanja Hibah
 - e. Anggaran Belanja Bantuan Sosial
 - f. Anggaran Belanja Hasil dan Bantuan Keuangan
 - g. Anggaran Belanja Tak terduga
 - h. Anggaran Belanja barang dan jasa
 - i. Anggaran belanja modal
5. Kondisi Keuangan Daerah
 - a. Kemandirian keuangan
 - b. Fleksibilitas keuangan
 - c. Solvabilitas operasional
 - d. Solvabilitas jangka pendek
 - e. Solvabilitas jangka panjang
 - f. Solvabilitas layanan
6. Opini BPK atas LKPD
Pengukuran dilakukan terhadap hasil opini BPK selama 3 tahun berturut-turut

Masing-masing pengukuran terdapat bobot setiap dimensi, dimensi 1 berbobot 15, dimensi 2 bobot 20, dimensi 3 bobot 15, dimensi 4 bobot 20, dimensi 5 bobot 15, dimensi 6 bobot 15. Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlah seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi.

Hasil pengukuran tersebut terdiri dari 3 cluster atau kelompok yaitu:

1. Kategori A : Baik
2. Kategori B : Perlu Perbaikan
3. Kategori C : Sangat Perlu Perbaikan

Sesuai dengan Radiogram Kementerian Dalam Negeri Nomor 080/2707/Litbang.Ses Tanggal 11 Mei 2022 diamanatkan agar Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota menginput atau melakukan entry pada aplikasi pengukuran IPKD. Penginputan data/dokumen indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan dokumen Tahun Anggaran 2021 yang dipersyaratkan ke dalam Aplikasi Pengukuran IPKD.

A. HASIL PELAKSANAAN

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Wajo mendapatkan nilai indeks Total 53,3132 berkategori Perlu Perbaikan.

Nilai indeks tersebut terdiri dari nilai:

1. Dimensi 1: 7,449
2. Dimensi 2: 12,8276
3. Dimensi 3: 5,4310
4. Dimensi 4: 15
5. Dimensi 5: 1,5956
6. Dimensi 6: 5,0100

B. Kabupaten Se-Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang

| NO. | KABUPATEN | DIMENSI 1 | DIMENSI 2 | DIMENSI 3 | DIMENSI 4 | DIMENSI 5 | DIMENSI 6 | INDEKS TOTAL | KATEGORI | NILAI |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------------|-------|
| 1. | Luwu Timur | 14,988 | 19,1379 | 11,1207 | 15 | 4,9150 | 15 | 80,1614 | Baik | A |
| 2. | Bantaeng | 12,004 | 20 | 14,4828 | 10 | 3,2398 | 15 | 74,7270 | Perlu Perbaikan | B |
| 3. | Pangkajene Kepulauan | 10,327 | 18,2759 | 7,5000 | 20 | 3,0166 | 15 | 74,1197 | Perlu Perbaikan | B |
| 4. | Luwu Utara | 6,654 | 19,6552 | 8,2759 | 10 | 2,3007 | 15 | 61,8856 | Perlu Perbaikan | B |
| 5. | Bulukumba | 9,565 | 13,7931 | 12,9310 | 10 | 2,6234 | 10,0050 | 58,9175 | Perlu Perbaikan | B |
| 6. | Wajo | 7,449 | 19,8276 | 5,4310 | 15 | 1,5956 | 5,0100 | 54,3132 | Perlu Perbaikan | B |
| 7. | Tana Toraja | 7,998 | 12,0690 | 7,7586 | 15 | 2,5781 | 0 | 45,4039 | Sangat Perlu Perbaikan | C |
| RATA-RATA NASIONAL | | | | | | | | | 64,1932 | |
| STANDAR DEVIASI NASIONAL | | | | | | | | | 10,7087 | |

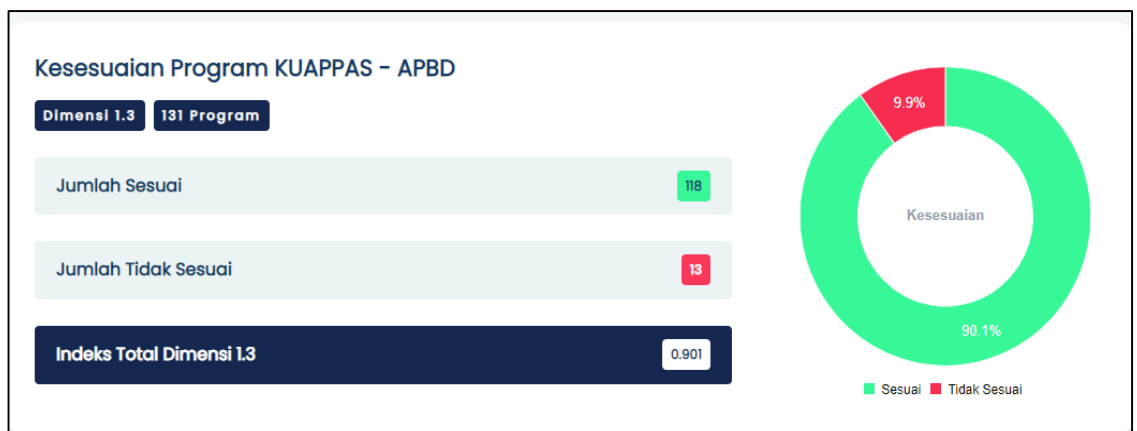
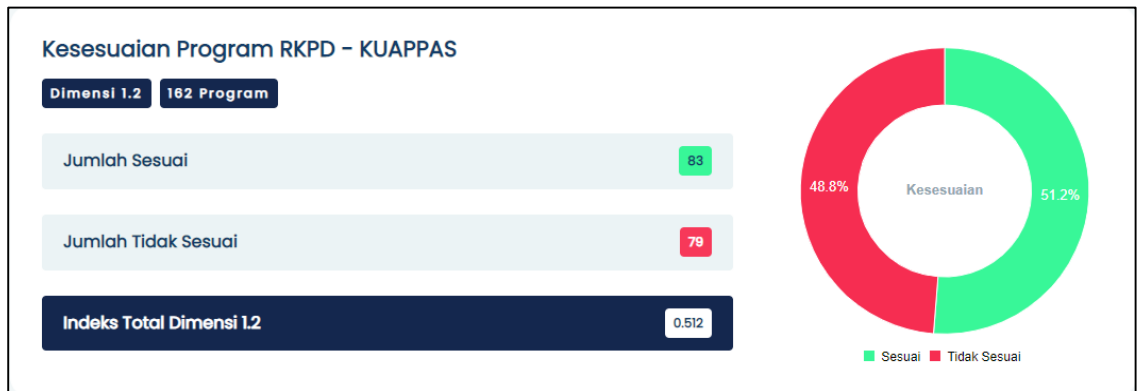
Uraian setiap dimensi pengukuran dikemukakan sebagai berikut:

1. Dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penanggaran)

Pengukuran pada dimensi 1 terdiri dari kesesuaian Program RPJMD dengan RKPD, kesesuaian Program RKPD dengan KUA-PPAS, kesesuaian KUA-PPAS dengan APBD, kesesuaian pagu RKPD dengan KUA-PPAS dengan APBD.

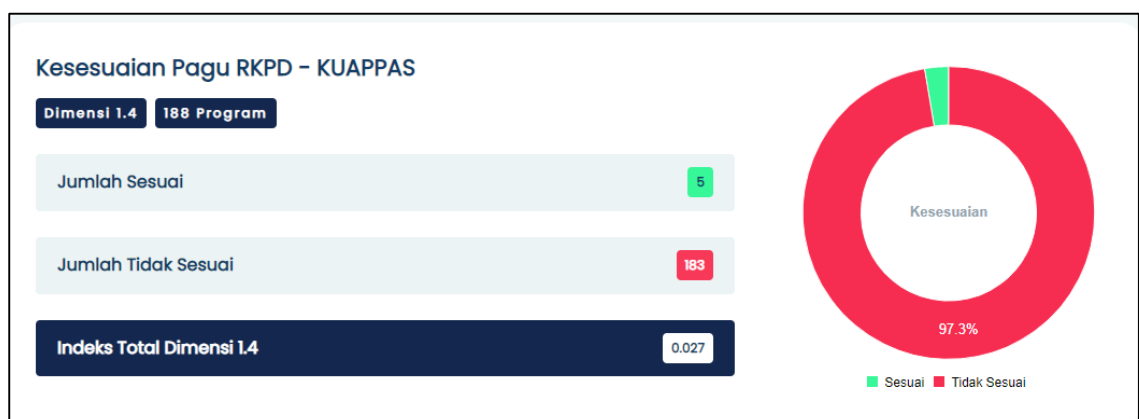


Hasil kesesuaian RPJMD dengan RKPD terdapat satu Program yang tidak sesuai, yaitu program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program tersebut tidak terdapat pada RPJMD namun ada di dokumen RKPD.



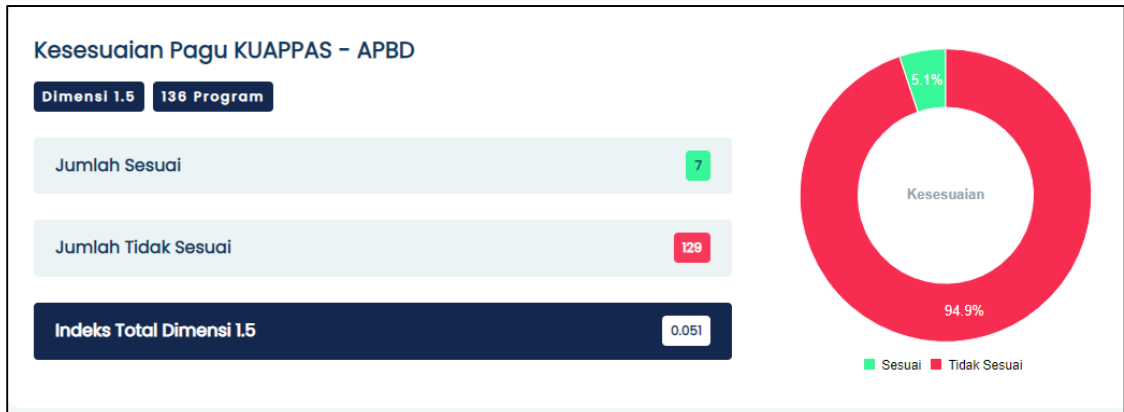
Hasil Kesesuaian RKPD dengan KUA PPAS memiliki hampir sama persentase kesesuaiannya, 51,2% atau 83 program sesuai dan 48,8% atau terdapat 79 program yang tidak sesuai. program tidak sesuai tersebut terdapat di dokumen RKPD maupun terdapat di dokumen KUA PPAS.

Hasil Kesesuaian KUA PPAS dengan APBD terdiri dari 118 program yang sesuai dan 13 program yang tidak sesuai. program tidak sesuai tersebut termuat pada dokumen KUA PPAS namun tidak terdapat di dokumen APBD, antara lain: program pengelolaan profil kependudukan, program administrasi umum, program layanan dan administrasi Keuangan, program perencanaan pemerintah dan pembangunan manusia, program perencanaan perekonomian dan sumberdaya alam, program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan. Dan program yang terdapat pada APBD dengan KUA PPAS antara lain: program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program pengelolaan taman makam



pahlawan, program perencanaan lingkungan hidup, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Hasil kesesuaian pagu RKPD dengan KUA PPAS terdapat nilai persentase kesesuaian yang rendah, 2,7% atau 5 pagu yang sesuai, selebihnya terdapat pagu program yang tidak sesuai. hal ini di sebabkan karena pagu program selalu mengalami perubahan.



Hasil kesesuaian pagu KUA PPAS dengan APBD memiliki pagu program sesuai hanya 7 saja. 129 pagu program tidak sesuai. hal ini dikarenakan pagu mengalami perubahan.

Dari hasil pengukuran hasil semua kesesuaian yang terdapat pada dimensi 1 dengan nilai indeks total 7.449



2. Dimensi 2 (Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD)

Indikator yang terdapat pada dimensi 2 terdiri dari alokasi belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan belanja SPM. Pada alokasi belanja tersebut telah sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan, kecuali alokasi belanja untuk memenuhi SPM.

3. Dimensi 3 (Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah)



Indikator pada dimensi ini terdiri dari ketetapan waktu dan keteraksanaan. Hasil pengukuran terdapat 4 informasi/dokumen yang memiliki ketetapan waktu, dan keteraksanaan terdapat 17 dokumen/informasi pada situs pemerintah daerah.

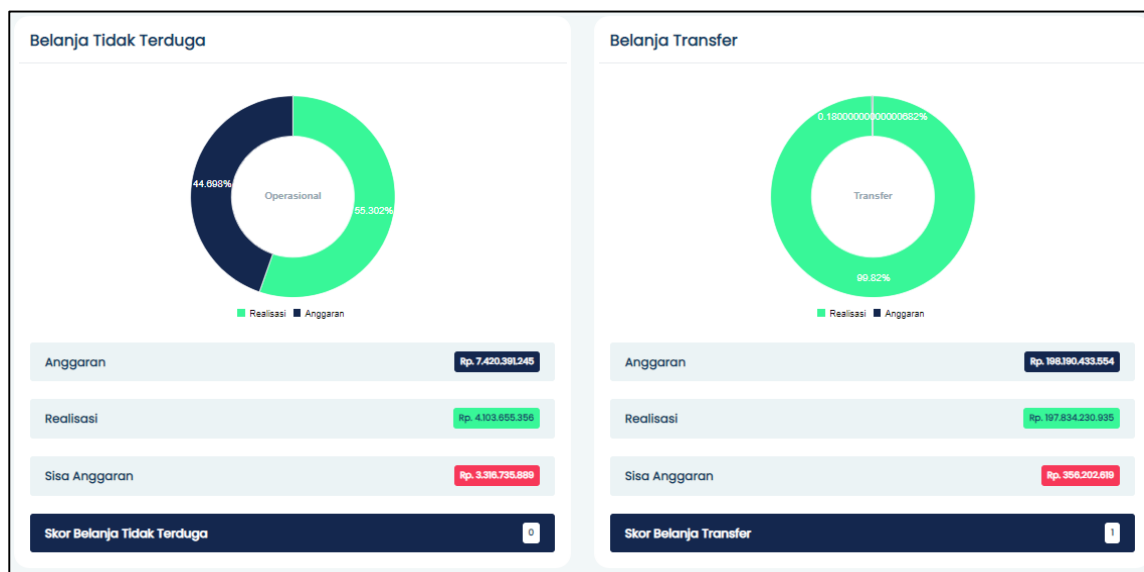
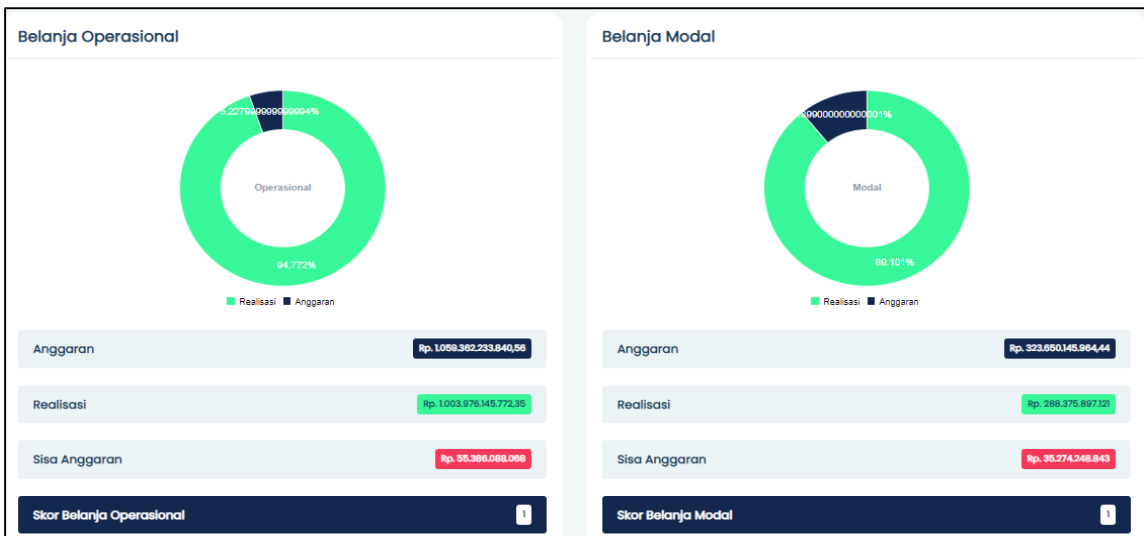
5.4310

Indeks Total Dimensi 3

Hasil diukur berdasarkan skor ketepatan waktu **4** dan skor keteraksanaan **17** lalu dibagi nya dengan **29** atau jumlah dokumen yang telah ditetapkan, setelah itu akan menghasilkan nilai rata rata skor ketepatan waktu **0.1379** dan rata rata skor keteraksanaan **0.5882**. Setelah itu untuk mencari seluruh skor rata rata maka dengan menjumlahkan kedua skor yang telah dihasilkan dan membaginya dengan **2** sehingga skor yang didapat adalah **0.3621**. Terakhir, skor tersebut akan dikalikan **15** maka Indeks Total Dimensi 3 yang didapat adalah **5.4310**

4. Dimensi 4 (Penyerapan Anggaran)

Data penyerapan anggaran diambil dari dokumen LKPD bagian Laporan Realisasi Anggaran, penyerapan anggaran mencakup anggaran belanja operasional, anggaran belanja modal, anggaran belanja tidak terduga, belanja anggaran transfer.



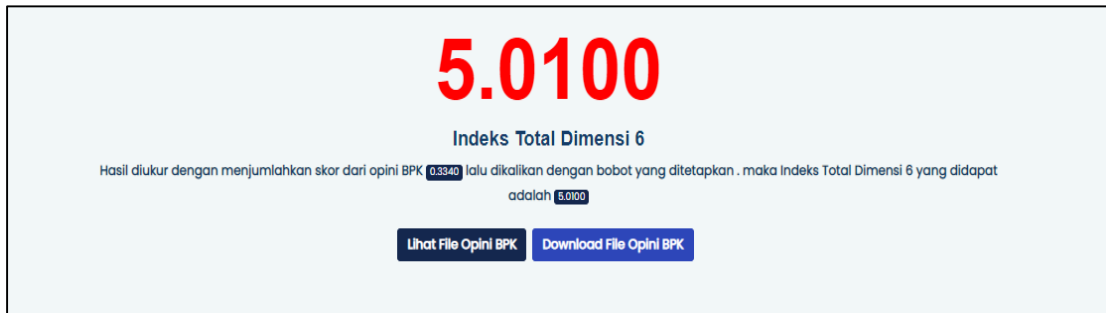
5. Dimensi 5 (kondisi keuangan daerah)

Pada dimensi ini untuk mengukur kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif.



6. Dimensi 6 (opini BPK)

Pemberian opini atas LKPD yang dilakukan oleh BPK RI



Hasil pengukuran indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021.



B. PENUTUP

Dengan adanya hasil IPKD Kabupaten/kota melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang penetapan hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021, Kabupaten Wajo mendapatkan nilai perlu perbaikan. Evaluasi dan perubahan harus terus dilanjutkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas kinerja tata kelola perencanaan dan keuangan daerah.

Demikian laporan ini disusun untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.